



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan
Joko Widodo Periode 2014-2019 Terkait Dinamika
Peningkatan Kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Mikhael Ryano Arianda Santyaputra

2016330233

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan
Joko Widodo Periode 2014-2019 Terkait Dinamika
Peningkatan Kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik**

Skripsi

Oleh

Mikhael Ryano Arianda Santyaputra

2016330233

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs. M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mikhael Ryano Arianda Santyaputra
Nomor Pokok : 2016330233
Judul : Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo
Periode 2014-2019 Terkait Dinamika Peningkatan Kekuatan di
Kawasan Indo-Pasifik

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 28 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

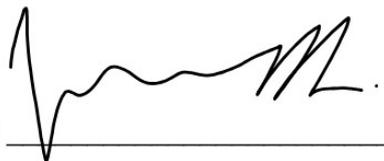
Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira

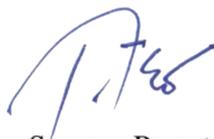
: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mikhael Ryano Arianda Santyaputra
NPM : 2016330233
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019
Terkait Dinamika Peningkatan Kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Juli 2020

Penulis,



Mikhael Ryano A.S

ABSTRAK

Nama : Mikhael Ryano Arianda Santyaputra
NPM : 2016330233
Judul : Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo
Periode 2014-2019 Terkait Dinamika Peningkatan Kekuatan di
Kawasan Indo-Pasifik

Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan peningkatan sistem pertahanan maritimnya dalam menghadapi dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia akan sangat diuntungkan apabila dapat mengelola wilayah lautnya dengan baik. Oleh karena hal itu pada awal masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019, Presiden menerapkan kebijakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melihat pada pilar kelima di dalam kebijakan Poros Maritim Dunia yang menyebutkan bahwa adanya upaya dalam pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai hal yang juga harus diperhatikan demi terwujudnya Poros Maritim Dunia.

Indonesia terletak di dalam posisi yang strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini merupakan kawasan yang erat kaitannya dengan persaingan antar negara terutama di wilayah lautnya. Maraknya kasus persengketaan wilayah di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi perhatian khusus bagi Indonesia agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat masuk ke wilayah kedaulatan negara. Oleh karena itu beberapa negara termasuk Indonesia harus dengan segera melakukan peningkatan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan kepentingan nasional negara.

Melalui penggunaan metode kualitatif dan data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan penelitian ini menemukan terdapat hal yang dilakukan Indonesia dalam melakukan peningkatan sistem pertahanan maritimnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 terkait dinamika peningkatan kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik. Hal yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan peningkatan kekuatan militer dan modernisasi alutsista, menyiapkan Kementerian dan badan yang berwenang dalam sistem pertahanan maritim, penegasan mengenai batas wilayah maritim Indonesia, dan melakukan hubungan kerja sama maritim dengan negara di kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci : Pertahanan Maritim, Kebijakan Poros Maritim Dunia, Ancaman, Kepentingan Nasional, Kawasan Indo-Pasifik.

ABSTRACT

Nama : Mikhael Ryano Arianda Santyaputra
NPM : 2016330233
Judul : *Indonesia's Maritime Defense of Joko Widodo's Government era in the 2014-2019 period Related to the Dynamics of Increasing Strength in the Indo-Pacific Region*

This research wants to illustrate how Indonesia's efforts in improving its maritime defense system in dealing with dynamics in the Indo-Pacific region. As the largest archipelago in the world, Indonesia will benefit greatly if it can manage its sea area properly. Therefore, at the beginning of Joko Widodo's regime in the 2014-2019 period, the President implemented a policy that wanted to make Indonesia a Global Maritime Fulcrum. Look at the fifth pillar in the Global Maritime Fulcrum policy which states that there is an effort in building maritime defense forces as something that must also be considered for the realization of the Global Maritime Fulcrum.

Indonesia is located in a strategic position in the Indo-Pacific region. This area is an area that is closely related to competition between countries, especially in the sea. The rise of the case of territorial disputes in the Indo-Pacific region is also a special concern for Indonesia to avoid various threats that can enter the country's sovereignty. Therefore, several countries including Indonesia must immediately increase their maritime defense power to secure the national interests of the country.

Through the use of qualitative methods and data collected from this research literature study, there is something that Indonesia has done in improving its maritime defense system in the era of President Joko Widodo's administration in the 2014-2019 period related to the dynamics of increasing power in the Indo-Pacific Region. What Indonesia has done is to increase military strength and modernize defense equipment, prepare ministries and competent bodies in the maritime defense system, affirm the maritime boundaries of Indonesia, and conduct maritime cooperation relations with countries in the Indo-Pacific region.

Keywords: Maritime Defense, Global Maritime Fulcrum, Threats, National Interests, Indo-Pacific Region.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang diberi judul “Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019 Terkait Dinamika Peningkatan Kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik “ disusun sebagai syarat kelulusan dalam jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa pengerjaan penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat menerima dan mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 7 Juli 2020

Mikhael Ryano Arianda S

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari benar bahwa penulisan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan, doa, motivasi serta bimbingan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun penulisan skripsi ini. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah dapat memberikan pencerahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Yandri Effrianda dan Ibu Woro Handajani yang telah memberikan dukungan doa dan materil dan mempercayakan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan S1 program studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Serta adik penulis Realino Donato yang juga telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
3. Mas Dr. I Nyoman Sudira, Drs. M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan segenap pikiran, tenaga, dan waktu kepada penulis sehingga penelitian yang dilakukan ini dapat tersusun dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan staff Karyawan Universitas Katolik Parahyangan terutama di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta program studi

Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan penulis di masa mendatang.

5. Adriana Carina yang telah selalu memberikan semangat dan motivasi yang lebih kepada kehidupan penulis dalam melakukan segala kegiatan dan juga memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik.
6. Seluruh sahabat penulis di masa perkuliahan Ferry, Rael, Abigail, Sonia, Madeline, Yohanes, Yudha, Loren. Yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh rekan seperjuangan bimbingan bersama Mas Nyoman Yudha, Reza, Ignass, Furqon, Firman, Vk, Maura, Nuti, Adel yang telah saling berkordinasi dan memotivasi dalam setiap melakukan bimbingan sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Seluruh penghuni kontrakan Rancabentang 1 no 11 Nicholas Wilson (Biji), Steffan, Agus, Tarigan, Thama yang telah memberikan kehidupan yang lebih berwarna di luar lingkungan perkuliahan dengan segala kejadian yang telah dialami bersama penulis selama tinggal bersama.
9. Seluruh rekan “Ambarita” yang mayoritas berasal dari jurusan Manajemen Unpar 2016 Abiyoso, Andre, Bagas, Berto, Jenjen, Jordy, Pipin, Ryan Malta, Adhi, dan yang lainnya yang telah memberikan pengalaman yang seru dan meninggalkan kesan yang mendalam pula selama menjalani kehidupan di Bandung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Deskripsi Masalah	5
1.2.2. Pembatasan Masalah	8
1.2.3. Rentang Waktu	9
1.2.4. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran	11

1.4.1. Kajian Literatur	11
1.4.2. Kerangka Pemikiran	15
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.5.1. Metode Penelitian	21
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.6. Sistematika pembahasan	23
2. SISTEM PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE 2014-2019.....	25
2.1. Penguatan Sistem Pertahanan dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia ..	27
2.1.1. Pertahanan Maritim untuk Mengamankan Kepentingan Nasional Indonesia.....	29
2.2. Perancangan Sistem Pertahanan Maritim Indonesia era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019	32
2.2.1. Faktor Penyebab Pembuatan Sistem Pertahanan dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia.....	35
2.2.2. Aktor yang Terlibat dalam Proses Penguatan Sistem Pertahanan dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia	37
2.2.3. Tantangan Sistem Pertahanan Maritim Indonesia dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia.....	40
2.3. Implementasi Sistem Pertahanan Maritim Indonesia.....	42
2.3.1. Implementasi Sistem Pertahanan Maritim dalam Membentuk Pertahanan Negara yang Tangguh.....	44

3. KAWASAN INDO-PASIFIK DAN ANCAMAN SERTA TANTANGANNYA BAGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA.....	48
3.1. Pertentangan Kepentingan Nasional di Kawasan Indo-Pasifik	49
3.1.1. Analisis Faktor Kepentingan Nasional Negara-Negara Besar di Kawasan Indo-Pasifik	52
3.1.2. Analisis Faktor Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik	55
3.2. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik.....	57
3.2.1. Kebangkitan Perekonomian Tiongkok	58
3.2.2. Peningkatan Kekuatan Militer di Kawasan	59
3.2.3. Persaingan Kebijakan <i>Free Open Indo-Pacific</i> AS dan <i>Belt Road Initiative</i> Tiongkok	61
3.3. Kondisi Indonesia dalam menghadapi Dinamika yang Terjadi dalam Kawasan Indo-Pasifik.....	66
3.3.1. Tantangan bagi Negara Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik melalui wilayah Maritim.....	64
3.3.2. Ancaman bagi Negara Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik melalui wilayah Maritim.....	66
4. PENINGKATAN SISTEM PERTAHANAN MARITIM INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DAN ANCAMAN DI KAWASAN INDO-PASIFIK.....	69

4.1. Sistem Pertahanan Maritim Indonesia terhadap Dinamika Kawasan Indo-Pasifik.....	69
4.1.1. Konstelasi Negara Indonesia dalam Menghadapi Anarki Kawasan Indo-Pasifik	71
4.1.2. Posisi Negara Indonesia terhadap Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik	74
4.2. Implementasi Sistem Pertahanan Maritim Indonesia dalam Kawasan Indo-Pasifik	77
4.2.1. Peningkatan Kekuatan Militer dan Modernisasi Alutsista.....	79
4.2.2. Menyiapkan Kementerian dan Badan yang Berwenang dalam Sistem Pertahanan Maritim	82
4.2.3. Penegasan mengenai Batas Wilayah Maritim Indonesia	87
4.2.4. Hubungan Kerja Sama Maritim dengan Negara di Kawasan Indo-Pasifik.....	90
5. KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Lokasi Kawasan Indo-Pasifik	50
Gambar 3.2. Perbandingan GDP dalam US\$ Tahun 1980-2016.....	58
Gambar 3.3. Daftar Negara dengan Anggaran Militer Terbesar di Dunia.....	60

DAFTAR SINGKATAN

AFCF	ASEAN Fisheries Consultative Forum
Alutsista	Alat Utama Sistem Persenjataan
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BAKAMLA	Badan Keamanan Laut
BRI	Belt Road Initiative
EAS	East Asia Summit
FOIP	Free Open Indo Pacific
GDP	Gross Domestic Product
GMF	Global Maritime Fulcrum
IMC	Indonesia Maritime Center
IOR	Indian Ocean Region
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IUU Fishing	Illegal Unreported and Unregulated Fishing
Kemenkomaritim	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Kemenkoplhukan	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia

OBOR	One Belt One Road
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
PMD	Poros Maritim Dunia
POLAIR	Polisi Perairan
QUADS	Quadilateral Security Dialogue
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPOA	Regional Plan of Action
SATGAS 155	Satuan Tugas
SISHANTA	Sistem Pertahanan Negara Semesta
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
Wanjaktu	Dewan Kebijakan Penentu
WWF	World Wide Fund for Nature
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan lebih dari 17.504 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia juga memiliki laut yang cukup luas, 5,8 juta km² merupakan jumlah luas laut yang berada di kawasan Indonesia¹. Saat ini di garis pangkal wilayah perairan Indonesia terdapat sejumlah 92 pulau terluar yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) oleh Indonesia. Dibalik luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia ini tentunya terkandung kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang terkandung di dalamnya ada sekitar 2.800 spesies flora, 3.500 spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba selain itu juga terdapat 600 spesies terumbu karang hal ini menjadikan laut Indonesia jauh lebih kaya dibandingkan Laut Merah yang hanya memiliki sekitar 40 spesies saja²

Menjadi sebuah negara kepulauan Indonesia harus menyadari bahwa sektor maritim dan kelautan merupakan hal yang sangat strategis bagi negara yang dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Sebagian besar wilayah laut Indonesia pun berbatasan langsung dengan negara

¹ Biro Perencanaan dan Informasi. Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia. Diakses pada 18 Agustus 2019. <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>

² Ibid.

tetangga disekitarnya seperti Singapura, Malaysia, Philipina, serta Australia. Melihat hal itu Indonesia dituntut untuk memiliki sistem pertahanan serta keamanan yang kuat karena ancaman bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Dengan memiliki sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat suatu negara akan lebih dapat menjamin keberlangsungan negaranya hal ini dikarenakan suatu negara akan lebih ditakuti oleh negara negara lain sehingga dapat meminimalisir ancaman³. Memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang baik sudah menjadi konsekuensi bagi suatu negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya.

Wilayah laut Indonesia yang luas menyebabkan terbentangnya jalur perdagangan serta transportasi internasional yang sangat strategis. Hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai tantangan serta ancaman yang datang dari luar bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Tantangan dan ancaman yang hadir dapat beraneka macam seperti contohnya pencurian sumber daya alam, perompakan, terorisme, perdagangan manusia serta sengketa perbatasan. Pertahanan negara yang kuat akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam menjaga kemandirian serta pertahanan wilayah laut dibutuhkan peran penting seorang Presiden dalam mengeluarkan kebijakan kebijakannya dan sebagai sebuah negara Indonesia juga memiliki Kementerian Pertahanan serta pasukan bersenjata yang kuat dalam hal ini TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan Indonesia. Peran dari

³ Kemhan. *Menhan: Indonesia Harus Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim*. Diakses pada 24 Agustus 2019. <https://www.kemhan.go.id/2016/11/03/menhan-indonesia-harus-membangun-kekuatan-pertahanan-maritim.html>

seluruh elemen ini sangat dibutuhkan demi terciptanya pertahanan serta keamanan laut yang kuat.

Lalu Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Menjadi poros maritim dunia dijadikan sebagai tujuan agar menciptakan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, besar, dan makmur. Cara-cara yang dilakukan dalam rangka mencapai hal tersebut ialah pengembalian identitas Indonesia sebagai negara maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memaksimalkan potensi maritim guna mengangkat perekonomian negara. Dalam mencapai tujuan itu berbagai hal dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi, penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia⁴. Dalam pemerintahan era Presiden Joko Widodo sejatinya Indonesia ingin membangkitkan kembali potensi potensi besar yang dimiliki oleh laut Indonesia. Presiden Joko Widodo memiliki visi dalam pembangunan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”⁵. Hal tersebut menjadi salah

⁴ Aji Sularso. *Poros Maritim dan Tol Laut*. Majalah Maritim Edisi Oktober 2014. Diakses pada 26 Agustus 2019. <http://ajisularso.com/poros-maritim>

⁵ Nugroho, Bagus Prihantoro. *4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita*. Diakses pada 26 Agustus 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisasi-nawacita>

satu langkah positif demi kembali membangkitkan potensi yang besar melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah laut Indonesia.

Di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia juga berambisi untuk memainkan peran penting dalam kawasan Indo-Pasifik. Ekspansi cepat dari kekuatan berbagai aspek di kawasan Indo-Pasifik memberikan peluang dan tantangan bagi kawasan ini. Perilaku agresif dan perkembangan pesat dari berbagai negara besar di kawasan seperti Tiongkok dapat meningkatkan ketegangan, terutama terkait sengketa maritim regional dan dapat menimbulkan efek yang sangat merugikan⁶. Di saat seperti itu negara-negara regional harus dapat berusaha untuk membentuk mekanisme keamanan maritim yang kolektif dalam bentuk pengembangan keyakinan melalui dialog resmi, pelatihan keamanan maritim kooperatif untuk mengatasi ancaman bersama untuk stabilitas regional agar dapat mencegah kesalahpahaman, mengurangi ketidakpercayaan, dan memperluas kepentingan bersama.

Perilaku agresif yang terus menerus dilakukan oleh Tiongkok pada akhirnya banyak negara-negara yang memilih untuk mencari perlindungan pada Amerika Serikat. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik membawa pengaruh yang cukup besar. Sebagai negara *super-power* Amerika Serikat merasa memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di kawasan ini. Di kawasan maritim Indo-Pasifik juga terlihat banyak permasalahan sengketa salah satu contoh adalah konflik

⁶ Laksamana Madya (Purn.) Hideaki Kaneda. *Menciptakan Koalisi Keamanan Maritim yang Mulus di Indo-Asia-Pasifik*. Indo-Pacific Defense Forum. Diakses pada 10 Mei 2020. <https://ipdefenseforum.com/id/menciptakan-koalisi-keamanan-maritim-yang-mulus-di-indo-asia-pasifik/>

di Laut Tiongkok Selatan yang dapat berpotensi menjadi konflik bersenjata. Penggunaan instrumen militer yang dilakukan oleh negara menyebabkan negara yang bersengketa melakukan peningkatan terhadap kapabilitas militernya. Penggunaan instrumen militer dan peningkatan kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini berdampak pada negara Indonesia. Walaupun Indonesia bukan secara terang-terangan menjadi bagian dari negara yang bersengketa namun hal ini akan tetap mempengaruhi karena secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara yang bersengketa dan wilayah yang disengketakan. Masalah pertahanan harus menjadi fokus utama pemerintah karena ancaman akan datang kapan saja. Salah satu kejadian yang telah dialami Indonesia adalah saat wilayah kedaulatan Indonesia dilanggar oleh kapal berbendera Tiongkok di kepulauan Natuna. Tentunya permasalahan kedaulatan menjadi kepentingan tiap negara termasuk Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Indonesia harus menyadari bahwa sebagai negara kepulauan sektor maritim dan kelautan merupakan hal yang sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Namun di era pemerintahan sebelumnya sektor kelautan masih kurang mendapat perhatian lebih jika dibandingkan dengan wilayah daratannya. Padahal secara letak geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat strategis kelautannya dengan diapit oleh dua samudera yakni samudera hindia dan samudera pasifik. Maraknya kasus *illegal*

fishing di Indonesia yang sangat merugikan bagi negara menggambarkan bahwa masih belum diperhatikannya sektor laut Indonesia.

Pada era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terdapat gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama kali diperkenalkan oleh Jokowi melalui pidato kepresidenan yang pertama kali setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Gagasan ini tentunya segera direalisasikan oleh pemerintah dengan menyusun perencanaan APBN tahun 2015 dimana presiden meningkatkan anggaran untuk infrastruktur dan pengadaan alutsista. Selain itu Jokowi juga menaikkan anggaran untuk infrastruktur dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan serta pembelian kapal dalam usaha untuk pembangunan tol laut demi terhubungnya seluruh wilayah Indonesia⁷. Gagasan tersebut merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Presiden untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan kuat untuk menghadapi persaingan global di masa sekarang ini.

Untuk mencapai tujuannya dalam menjadi poros maritim dunia Indonesia diharapkan mampu untuk merespon dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan keamanan maritim di kawasan. Permasalahan keamanan maritim juga berkembang menjadi banyaknya permasalahan non-tradisional seperti permasalahan *illegal fishing*, perompakan, kejahatan terorisme dan yang lainnya menjadi isu yang harus diperhatikan karena hal ini secara langsung dapat mengancam kredibilitas dan wilayah negara. Selain permasalahan non-tradisional

⁷ Kemenkeu. *Infografis APBN Indonesia 2015*. Kemeku.go.id. Diakses pada 10 Mei 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2015>

juga tentunya terdapat banyak permasalahan mengenai permasalahan ekonomi dan lingkungan yang berdampak pada permasalahan keamanan dan politik. . Sebagai negara yang strategis terhadap jalur perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia dikategorikan menjadi negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional⁸.

Membangun sebuah kekuatan maritim di kawasan merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah Indonesia. Terutama dalam hal ini terkait kesiapan untuk menghadapi dinamika yang terjadi di dalam kawasan Indo-Pasifik. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh komponen di dalam negara. Membangun kekuatan maritim dibutuhkan pasukan angkatan laut, armada niaga, dan pangkalan laut yang seluruhnya harus bersinergi. Pembangunan dalam sektor maritim harus segera diperhatikan demi tercapainya hal tersebut. Untuk menjadikan sebuah bangsa yang besar negara harus dapat mengamankan kepentingannya terutama dalam hal ini kepentingan di laut untuk mencapai hal tersebut perlu dukungan dari armada Angkatan Laut yang kuat yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan yang lebih luas⁹.

Persiapan terus diupayakan dan di kembangkan melalui kebijakan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah terus gencar dalam meningkatkan keamanan serta pertahanan dari wilayah maritim Indonesia guna

⁸ Kemhan RI, *Kebijakan Pertahanan 2016 Diarahkan untuk Mempercepat Implementasi Kebijakan Pertahanan Maritim*, dalam <https://www.kemhan.go.id/2016/01/20>, diakses pada 27 Agustus 2019.

⁹ Alfred T. Mahan. *Mahan on Naval Warfare : Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred Mahan*. (New York: Courier Dover Publications, 2011), HI 22.

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh laut Indonesia. Saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk memulai memaksimalkan potensi laut Indonesia. Komitmen pemerintah untuk melakukan memperkuat pertahanan maritim layak mendapat perhatian khusus agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tepat sasaran.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul penulisan yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya fokus analisa penelitian ini ditujukan kepada sistem pertahanan maritim Indonesia dalam kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo periode 2014-2015 dalam menghadapi dinamika meningkatnya kekuatan di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan pada pilar kelima dalam kebijakan poros maritim dunia yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim.

Melihat luasnya cakupan kawasan di dalam penelitian penulis memfokuskan kepada persaingan yang terjadi dalam kawasan Indo-Pasifik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pembatasan ini menimbang bagaimana implementasi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika persaingan di kawasan Indo-Pasifik. Objek penelitian yang dianalisa dalam penelitian ini adalah sistem pertahanan maritim Indonesia. Dimana sistem pertahanan maritim diimplementasikan Indonesia untuk mengamankan kepentingan Indonesia terkait persaingan antar negara di kawasan Indo-Pasifik.

1.2.3. Rentang Waktu

Penulis membatasi penelitian ini dengan periode waktu dari tahun 2014-2019. Dimana rentang waktu tersebut merupakan masa jabatan Presiden Joko Widodo pada periode yang pertama. Selain itu pada tahun 2014 pula konsepsi Poros Maritim Dunia (PMD) ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo secara resmi di Naypidaw Myanmar pada forum East Asian Summit ke-9. Rentang waktu ini diakhiri pada tahun 2019 dikarenakan data mengenai objek penelitian mengenai kebijakan Poros Maritim Dunia masih terus dikembangkan menyebabkan penulis harus memberi batasan waktu yang jelas agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif.

1.2.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan riset yang akan dianalisa dan dijawab penulis adalah **Bagaimana Indonesia meningkatkan pertahanan maritimnya dalam menghadapi tantangan dan ancaman maritim di wilayah Indo-Pasifik?**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan sistem pertahanan maritim Indonesia dalam implementasi Kebijakan Poros Maritim Dunia untuk menghadapi dinamika penguatan wilayah Indo-Pasifik yang berdasarkan pada pilar kelima Kebijakan Poros Maritim Dunia yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Penelitian ini agar dapat dilihat juga bahwa dengan menjaga pertahanan maritim negara Indonesia dapat mengamankan kepentingannya di wilayah laut.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca yang berminat mengenai studi tentang kajian pertahanan maritim. Dalam penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Kebijakan Poros Maritim Dunia yang sedang di jalankan oleh Pemerintah era Presiden Joko Widodo. Dan penelitian ini juga berguna dalam mengimplementasikan teori-teori dalam Hubungan Internasional dan juga dapat menambah pengetahuan mengenai visi poros maritim dunia. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya pertahanan wilayah di dalam negara khususnya di bidang kemaritiman. Dan yang terakhir penelitian ini dibuat sebagai persyaratan kelulusan Strata-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

1.4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Perkembangan kondisi pertahanan dan stabilitas wilayah maritim di kawasan Indo-Pasifik hingga saat ini memicu berbagai peneliti untuk menuangkannya di dalam buku ataupun jurnal-jurnal dan juga tesis yang membahas mengenai permasalahan ini. Dalam menghadapi dinamika kawasan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga memiliki peranan tersendiri melalui implementasi kebijakan maritim yang terpadu.

Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh *CBDS Bina Nusantara Univeristy and Indonesian Association for International Relations* yang berjudul *Jokowi's Maritime Axis : Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific* membahas tentang bagaimana penerapan doktrin maritim Jokowi dalam menghadapi perubahan strategi di kawasan Indo-Pasifik¹⁰. Dalam jurnal ini pengaruh doktrin maritim Jokowi terhadap pertahanan Indonesia digambarkan untuk menunjukkan bagaimana sebuah doktrin poros maritim dunia dapat meningkatkan pertahanan maritim Indonesia.. Penulis juga memahami bagaimana reformasi kebijakan pertahanan serta peningkatan anggaran militer Indonesia, bagaimana kerjasama luar negeri Indonesia, dan keaktifannya dalam pembangunan institusi di kawasan Indo-Pasifik.

¹⁰ Agastia, I Gusti Bagus Dharma dan Perwita, A. A. Banyu, *Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific*, Journal of ASEAN studies, CBDS Bina Nusantara University and Indonesian Association for International Relation (2015)

Selanjutnya literatur yang membantu penulis dalam melakukan penelitian adalah sebuah jurnal yang berjudul *New Direction in Maritime Strategy* karangan Geoffrey Till. Di dalam tulisannya ini dijelaskan bahwa wilayah laut memegang peranan yang sangat penting pada era globalisasi ini jika dibandingkan dengan wilayah darat dan udaranya¹¹. Pemikiran ini membantu penulis dalam mengarahkan pembuatan tulisan ini terutama dari sisi bagaimana pengembangan potensi maritim dalam lingkup kawasan di era globalisasi ini. Terdapat empat buah langkah untuk mengembangkan potensi maritim dalam lingkup kawasan, yaitu ; *sea control, maintaining trading system, good order at sea, dan maintaining consesnsus*. Melalui jurnal ini penulis mendapatkan pemahaman bahwa di era globalisasi ini aspirasi internasional terhadap sektor maritim tidak hanya bersifat tradisional seperti halnya hanya pengawasan terhadap laut (*sea control*) untuk mengamankan wilayah daratan tetapi juga laut dilihat untuk potensinya yang terdapat berbagai kekayaan alam, sarana transportasi, dan juga laut merupakan aspek yang penting bagi lingkungan negara.

Lalu literatur yang selanjutnya penulis melihat jurnal yang diterbitkan oleh *Singapore Institute of Southeast Asia Study* yang berjudul *Resource Issue and Ocean Governance in Indo-Pacific : an Indonesian Perspective*. Dalam jurnal ini menyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang dikenal karena dinamika ekonomi dan keuntungan geosentrisnya yang merupakan wilayah yang rawan dengan memiliki berbagai macam konflik dan persaingan¹². Akhir dari era

¹¹ Geoffrey Till. *New Direction in Maritime Strategy*. Naval War College Review Vol 60 no. 4 (2007) : hal 30.

¹² Dewi Fortuna Anwar, *Resource Issue and Ocean Governance in Asia Pacific: An*

perang dingin yang diharapkan mampu membuat negara-negara hidup dalam perdamaian setelah sempat terpecah dalam kubu yang berbeda, justru saat ini terdapat kebangkitan kembali persaingan tradisional diantara kekuatan negara di dalam kawasan sehingga merujuk pada permasalahan teritori dan perbatasan wilayah. Peningkatan persaingan mengenai sumber daya alam juga semakin memperburuk hubungan antar negara di dalam kawasan yang sudah dari awal hubungan di kawasan ini tidak stabil. Permasalahan yang terjadi di kawasan ini kebanyakan mengenai pertikaian di wilayah maritim. Terdapat dua faktor penentu yang menyebabkan terjadinya permasalahan diantaranya adalah pertama batas wilayah kelautan yang tidak pasti yang merupakan konsekuensi dari UNCLOS dan yang kedua adalah terdapatnya kecenderungan terhadap eksploitasi sumber daya kelautan tanpa mempertimbangkan yurisdiksi teritorial.

Kemudian yang menjadi acuan saya dalam membuat penulisan terdapat juga sebuah jurnal yang ditulis oleh Syaiful Anwar yang berjudul **Membangun Keamanan Maritim Indonesia dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut**. Di dalam jurnal ini melihat bagaimana cara membangun keamanan maritim Indonesia dalam analisis kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut¹³. Analisis dimulai dengan melihat apa kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, disini disimpulkan bahwa terdapat tiga kepentingan nasional Indonesia yaitu; terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, terjaganya sumber daya maritim lalu terjaminnya pelayaran komersial baik domestik maupun

Indonesian Perspective. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006)

¹³ Anwar, Syaiful. *Membangun Keamanan Maritim Indonesia dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut*. <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/315/190>

internasional, juga untuk tercapainya kesejahteraan bangsa. Selain itu melalui jurnal ini penulis dapat melihat ancaman-ancaman yang datang di wilayah perairan Indonesia yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah adalah pembajakan di laut, penangkapan ikan secara ilegal, sengketa wilayah antar negara, penyeludupan narkoba, serta penyeludupan manusia.

Dan yang terakhir terdapat literasi yang merupakan buku elektronik (*e-book*) yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang berjudul **Kebijakan Kelautan Indonesia**. Di dalam buku ini menjabarkan dengan lengkap peta jalan kebijakan kelautan Indonesia termasuk di dalamnya terdapat pilar kebijakan, kebijakan utama, strategi, prinsip, serta dasar hukum di dalam pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia¹⁴.

Melalui berbagai sumber literasi yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian penulis dapat menemukan berbagai sumber informasi serta arahan pemikiran untuk melihat bagaimana penerapan sistem pertahanan Indonesia di dalam kebijakan poros maritim dunia dalam menghadapi dinamika penguatan di kawasan Indo-Pasifik. Penulis melihat bahwa kebijakan pertahanan maritim yang diusung oleh pemerintah Indonesia ini bermula karena adanya berbagai ancaman yang masuk yang mengusik wilayah kedaulatan Indonesia melalui wilayah laut. Dengan adanya berbagai ancaman tersebut tentunya Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang efektif guna mempertahankan wilayahnya. Maka dari itu dalam penulisan akan dijabarkan mengenai bagaimana Indonesia menerapkan sistem

¹⁴ *Kebijakan Kelautan Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jakarta (2017)

pertahanannya dan apa dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik yang menyebabkan Indonesia harus siap untuk menjaga pertahanan negaranya.

1.4.2. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Indonesia meningkatkan pertahanan maritimnya dalam menghadapi tantangan dan ancaman maritim di wilayah Indo-Pasifik penulis menggunakan teori dan beberapa konsep yang digunakan supaya dapat memberikan hasil yang komprehensif dalam meneliti rumusan masalah tersebut. Selain itu teori dan konsep dibutuhkan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dan juga ditujukan untuk menjaga arah serta pandangan yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Teori utama yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori **Neorealisme** dan beberapa konsep yang akan dijelaskan dan berhubungan dengan berbagai penjelasan dalam penulisan seperti konsep **Ancaman (*Threat*)**, **Kepentingan Nasional**, serta konsep **Pertahanan Maritim** itu sendiri yang keseluruhan komponen akan digunakan dalam penelitian ini.

Ancaman

Sebelum menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis akan menjabarkan mengenai definisi ancaman yang dimaksud dari penelitian ini. Menurut Kenneth Waltz ancaman adalah sebuah konsep yang lebih daripada kekuasaan ancaman mencakup target agregat, kemampuan ofensif, dan pengaruh kekuatan kekuasaan. Dalam situasi terancam negara akan mengambil sikap untuk mendekati negara lain yang menurutnya akan dapat membentuk sebuah aliansi baru sehingga dapat

meningkatkan kemampuan ofensifnya¹⁵. Dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan bagi negara, khususnya dalam pemahaman neorealisme karena hubungan kerjasama ini akan menciptakan *balance of power* yang ditujukan untuk mempertkuat keamanan. Sedangkan menurut John M. Collins, dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga buah pertimbangan diantaranya adalah ; pertama adalah cara menilai kemampuannya (*capabilities*), kedua intensitasnya (*intension*), dan ketiga adalah bagaimana kemudahannya untuk dapat diserang (*vulnerabilities*)¹⁶.

Neorealisme

Dalam penelitian ini teori utama yang digunakan oleh penulis adalah teori neorealisme yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Pemikiran Kenneth Waltz berawal dari kegagalan realisme klasik dalam menjelaskan fenomena dunia di era globalisasi ini. Fokus Waltz dalam merumuskan teori neorealisme berada pada struktur sistem internasional dan konsekuensi struktur tersebut bagi hubungan internasional. Konsep struktur tersebut dijelaskan oleh Waltz sebagai berikut¹⁷ ; Pertama, Waltz mencatat bahwa sistem internasional adalah anarki; tidak ada pemerintahan dunia. Kedua, sistem internasional terdiri dari serupa unit: setiap negara, besar atau kecil harus menjalankan serangkaian fungsi pemerintah yang serupa seperti pertahanan nasional, pengumpulan pajak, dan peraturan ekonomi.

¹⁵ Kenneth Waltz, *The Anarchic Structure of World Politics*. Dalam *International Politics : "Enduring Concept and Contemporary Issues"*. ed Robert J. Art dan Robert Jervis (United States : Pearson Longman, 2009), hl 31-32

¹⁶ Wahyono, S.K. *Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional*, KKSNI UI, 2003, hal 19-20.

¹⁷ Kenneth Waltz, *The Anarchic Structure of World Politics*. Dalam *International Politics : "Enduring Concept and Contemporary Issues"*. op,cit hl 35

Kemudian Waltz menggambarkan pula sistem internasional yang sangat pelit dan abstrak dengan sedikit elemen. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu anarki yang terdiri dari negara yang sangat beragam dan berbeda dalam satu hal yang penting.

“*Politics in the absence of government*” merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Waltz dalam menjelaskan sistem anarki dengan tidak adanya otoritas yang lebih tinggi dari negara untuk menegakkan aturan dan mengatur hubungan antar negara¹⁸. Di dalam pemikiran Waltz anarki disini tidak diartikan sebagai sebuah kekacauan melainkan terdapatnya sebuah keteraturan yang terbentuk dari distribusi kekuatan dari unit-unit di dalam sebuah struktur. Distribusi kekuatan (*power*) menyebabkan negara dibedakan menjadi dua yaitu ; negara *great power* yang memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi struktur internasional dan negara *less power* yang tidak dapat memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut sehingga tindakannya akan dipengaruhi oleh stuktur itu sendiri¹⁹.

Struktur internasional yang anarki membuat negara harus dapat menjamin keamanan wilayah dan kepentingannya masing masing yang orientasinya adalah untuk dapat tetap bertahan (*survive*). Di dalam sistem internasional sebuah keberlangsungan, kemakmuran, dan kehancuran dari sebuah negara sangat bergantung pada hasil dari usahanya sendiri. Hal ini tentunya mengakibatkan bahwa tindakan-tindakan sebuah negara dalam struktur internasional sangat didasarkan

¹⁸ Ibid hl 32.

¹⁹ Kenneth Waltz, *The Anarchic Structure of World Politics*. Dalam *International Politics*, op.cit., hl 42

pada prinsip *self-help* yang artinya sebuah negara akan tetap terus berusaha untuk dapat bertahan dalam sistem internasional²⁰.

Kepentingan Nasional

Dalam menganalisis penelitian ini juga didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Dalam paradigma realisme klasik, Hans J. Morgenthau juga memaparkan mengenai konsep kepentingan nasional. Dalam kepentingan nasional, negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam negeri maupun dunia internasional. Kepentingan didefinisikan sebagai power dan merupakan faktor penting dalam politik. Realisme klasik melihat bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara harus didasari pada kepentingan nasionalnya. Kepentingan tersebut adalah sebuah tindakan negara terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional yang mendasari tindakan politik selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi internasional disaat kebijakan luar negeri tersebut diresmikan. Kepentingan nasional didefinisikan sebagai konsep yang meliputi kategori dari suatu negara.

Menurut konsep yang dipaparkan oleh Morgenthau kepentingan nasional dibagi ke dalam dua jenis yaitu²¹ ;

²⁰ Loc.Cit.

²¹ Hans J. Morgenthau, *Another 'Great Debate': The National Interest of the United States*, The American Political Science Review, (December 1952)

1. Core/basic/vital interest; memiliki nilai kepentingan yang tinggi sehingga suatu negara siap untuk berperang demi meraihnya. Contohnya adalah melindungi daerah atau wilayah teritorinya.

2. Secondary interest; nilai kepentingannya tidak terlalu tinggi namun merupakan segala bentuk keinginan yang hendak dicapai, dan dalam mencapainya tidak perlu sampai berperang, masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya, seperti melalui perundingan.

Fungsi dari kepentingan nasional sendiri juga merupakan panduan bagi para pemimpin negara untuk melakukan hubungan dengan luar negeri dan menjadi patokan dalam membuat kebijakan luar negeri. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan menetapkan kebijakan-kebijakan luar negerinya untuk mengatur agar lebih terarah dalam mengadakan suatu hubungan internasional. Secara tidak langsung kepentingan nasional juga berfungsi sebagai akses suatu negara untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia internasional.

Selain itu menurut pandangan dari Kenneth Waltz kepentingan nasional juga berhubungan dengan bagaimana sebuah negara berhasil mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam struktur internasional dengan melakukan segala cara yang dianggap merupakan hal yang terbaik untuk memenuhi kepentingannya tersebut²². Keberhasilan sebuah negara dalam mencapai kepentingannya ini juga

²² Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Introduction to International Relations*. (United States : Oxford University Press Inc., 2007), hl 75

mengacu kepada pembuatan kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh struktur internasional atau dapat diartikan dengan ini sebuah kebijakan akan diambil bukan berasal dari keinginan seorang pemimpin negara melainkan merupakan sebuah hasil dari *structural constraint*²³. Dalam paham neorealisme beranggapan bahwa sebuah negara dalam mengejar kepentingannya akan berada di dalam posisi yang harus melakukan kerjasama karena adanya keterbatasan kemampuan yang dimilikinya demi memenuhi kepentingan nasionalnya²⁴. Yang biasanya terjadi adalah hubungan *bandwagoning* dimana sebuah negara *less power* akan mengambil keuntungan dari negara *great power* dalam mengejar kepentingan nasionalnya.

Pertahanan Maritim

Dan mengenai pertahanan maritim sendiri penulis melihat gambaran yang dimaksudkan dari pertahanan maritim itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara melalui wilayah kelautannya. Keamanan maritim merupakan salah satu isu baru yang dimasukkan kedalam fenomena Hubungan Internasional. Aktor-aktor utama dalam Hubungan Internasional telah mulai memasukan hal ini untuk menjadi perhatian khusus mengingat maraknya berbagai kepentingan nasional yang menguat di wilayah laut. Keamanan maritim pertama-tama dapat dipahami dalam matriks hubungannya dengan konsep-konsep lain, seperti keselamatan laut, tenaga laut, dan ketahanan negara. Kedua, kerangka kerja sekuritisasi memungkinkan untuk mempelajari

²³ Loc.Cit.

²⁴ Kenneth Waltz, *The Anarchic Structure of World Politics*. Dalam *International Politics*, op.cit., hl 50

bagaimana ancaman-ancaman maritim dibuat dan klaim-klaim politik yang berbeda mana yang diperlukan untuk mengungkap kepentingan-kepentingan politik dan ideologi-ideologi yang berbeda. Ketiga, teori praktik keamanan memungkinkan studi tentang apa yang sebenarnya dilakukan aktor ketika mereka mengklaim meningkatkan keamanan maritimnya²⁵.

1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih penulis karena dirasa dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertahanan maritimnya dalam menghadapi dinamika peningkatan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Di dalam penggunaan metode kualitatif penulis melihat pemaparan dari John W. Creswell yang menyebutkan bahwa di dalam metode kualitatif terdapat tiga tahap tingkatan yaitu²⁶; Pertama, ialah tahap pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk menyaring data. Data-data tersebut dapat bersumber dari dokumen, wawancara atau pun sebuah observasi langsung. Kedua, merupakan tahap analisis data. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk dapat memahami keseluruhan data serta mengkaitkannya dengan berbagai kerangka teori agar dapat menjawab fenomena fenomena tertentu. Ketiga, merupakan tahap akhir dengan

²⁵ C. Bueger, *What is Maritime Security?*, Marine Policy Journal, No. 53, 2015, hlm. 159

²⁶ John. W Creswell, 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Third Edition, Sage Publications. Hal 32

melakukan sebuah interpretasi data. Interpretasi ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan data dan teori yang dipakai. Berdasarkan tahapan-tahapan ini lah yang kemudian memudahkan penulis dalam menjabarkan secara detail bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi dinamika peningkatan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Martono studi pustaka perlu untuk untuk memperkaya konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian²⁷. Dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan teknik studi pustaka ini. Dalam studi pustaka data yang dihasilkan merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membaantu proses penelitian, penulis mengumpulkan informasi berdasarkan dokumen resmi dari negara yang dikeluarkan oleh parlemen dan kementerian atau berdasarkan wawancara kepada pihak yang terkait pada penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, *output* dari media massa digital seperti artikel dalam surat kabar, buku-buku, serta karya ilmiah terkait yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Adapun sumber *website* yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari sumber media online yang valid dan terpercaya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mendapatkan data-data yang berupa fakta dan mengetahui konsep metode yang akan digunakan.

²⁷ Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan peneliti dalam penulisan dibagi ke dalam 5 (lima) yang secara sistematis agar mempermudah pembaca memahami bagaimana hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab I

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta berbagai rumusan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun. Pada bab ini juga mengidentifikasi tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur yang dipakai penulis untuk menjadi acuan dalam membuat penelitian, teknik dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan

Bab II

Dalam bab ini berisikan mengenai bahasan tentang sistem pertahanan maritim Indonesia itu tersendiri. Peneliti mendefinisikan sebuah sistem sebagai unsur-unsur yang berada di suatu lingkungan yang memiliki satu tujuan. Disini penulis memberikan gambaran bagaimana sebuah sistem pertahanan maritim Indonesia diupayakan untuk disusun dalam kebijakan Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo sehingga sistem pertahanan maritim dapat memiliki peran yang lebih untuk menguatkan sistem pertahanan negara.

Bab III

Di bab III bersikan bahasan mengenai dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Dimana fenomena yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik erat kaitanya dengan persaingan antar negara terutama di kawasan maritimnya. Banyaknya persengketaan di wilayah laut juga semakin mengeratkan hubungan persaingan diantara negara-negara di kawasan. Penulis memfokuskan pada persaingan yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dimana kedua negara *super power* ini saling berebut untuk menjadi hegemoni di kawasan. Hal ini akan berimbas pada terancamnya kepentingan kepentingan nasional negara lain di kawasan termasuk Indonesia.

Bab IV

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan mengenai analisa yang memberikan pemahaman bagaimana pemerintah Indonesia meningkatkan sistem pertahanan negaranya untuk menghadapi dinamika peningkatan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sistem pertahanan yang tentunya telah menjadi sebuah fokus utama juga dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia. Analisa menggunakan data-data yang telah dituliskan pada bab II dan bab III dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang telah dijabarkan dalam bab I

Bab V

Bab V merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan. Peneliti menguraikan hasil dari analisa tersebut berupa kesimpulan dengan menggunakan seluruh komponen yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.